

TESIS

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENGAMBIL
TINDAKAN DISIPLIN BERKAITAN DENGAN ASPEK HUKUM PIDANA
STUDI PEMBARUAN HUKUM DALAM UNDANG- UNDANG 14
TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN**

***Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas***



Oleh :

JENIFER THESYA

2420113034

Pembimbing :

**Prof. Dr. Ismansyah, S.H., M.H
Dr. Lucky Raspati, S.H., M.H**

PRGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP GURU DALAM MENGAMBIL
TINDAKAN DISIPLIN BERKAITAN DENGAN ASPEK HUKUM PIDANA STUDI
PEMBARUAN HUKUM DALAM UNDANG- UNDANG 14 TAHUN 2005 TENTANG
GURU DAN DOSEN**

**Jenifer Thesya, 2420113034, Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana,
Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 118 Halaman, 2026**

ABSTRAK

Pendidikan merupakan sarana penting dalam pembentukan karakter dan kedisiplinan peserta didik, di mana guru memiliki peran sentral dalam menegakkan tata tertib di lingkungan sekolah. Namun, tindakan disiplin yang dilakukan guru dapat bersinggungan dengan ketentuan hukum pidana dan berpotensi dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan atau kekerasan terhadap anak. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan kriminalisasi terhadap guru, meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugas profesionalnya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap guru yang mengambil tindakan disiplin dalam perspektif Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen? (2) Bagaimanakah batas-batas kewenangan guru dalam mengambil tindakan disiplin terhadap peserta didik berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia? dan (3) Bagaimanakah pembaruan hukum yang diperlukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen guna memberikan kepastian hukum terhadap tindakan disiplin guru yang bersinggungan dengan ketentuan hukum pidana? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap guru, batas-batas kewenangan guru dalam mengambil tindakan disiplin, serta pembaruan hukum yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi guru. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analitis, yang memadukan data primer berupa hasil wawancara di SMPN 28 Kota Padang dan kuesioner dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi guru dalam menjalankan tugas profesionalnya, tetapi belum mengatur secara tegas mengenai batas tindakan disiplin yang dapat dibenarkan secara hukum. Dalam praktiknya, tindakan disiplin tertentu masih berpotensi bersinggungan dengan ketentuan hukum pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dan penguatan norma dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang mengatur secara lebih jelas batas kewenangan guru, bentuk tindakan disiplin yang diperbolehkan, serta mekanisme perlindungan hukum bagi guru. Pembaruan tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak peserta didik dan kepastian hukum bagi guru dalam menjalankan fungsi pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif x empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis, yang memadukan data primer hasil wawancara di SMPN 28 Kota Padang dan kuesioner dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum pendidikan, serta kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum, guru, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan perlindungan hukum yang lebih memadai bagi guru dalam menjalankan fungsi pendidikannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Guru, Tindakan Disiplin, Hukum Pidana, Pembaruan Hukum.